

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya gereja adalah orang dan persekutuan yang kudus. Hal ini memberikan penegasan bahwa gereja adalah setiap individu manusia yang telah hidup dalam terang dengan menginternalisasi nilai-nilai kristiani yang dipusatkan pada keyakinan terhadap Firman Allah yang hidup (Yesus Kristus) dan di dalam Alkitab yang merekam seluruh pengajaran dan sumber penghayatan keimanan kristen. Gereja yang merujuk pada orangnya hidup dalam persekutuan gereja-gereja yakni himpunan orang-orang yang telah dipilih Allah dalam suatu keutuhan dan bukan untuk organisasi tertentu¹.

Agama (gereja) dan negara (pemerintah) merupakan dua lembaga dan juga memiliki batasan-batasan tertentu dalam kehidupan masyarakat, namun kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan tanggung-jawab yang sama dimana memelihara dan menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi

¹G.C.Van Niftrik dan B.J. Boland, *Dogmatika Masa Kini* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 359.

masyarakat dan umat dalam sebuah negara atau komunitas masyarakat tertentu. Meskipun dalam menjalankan peran masing-masing, negara kadang dianggap sebagai institusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan agama, tetapi negara punya kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak agama (gereja) yang ada dalam suatu negara.² Negara melindungi gereja dalam menjalankan kegiatan ibadah dari sudut lahiriah, mempertahankan ajaran, membela kedudukan, mengatur gereja sesuai dengan pergaulan masyarakat dimana gereja berada. Negara juga harus membina kesusilaan keadilan kepada gereja sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU sehingga kehidupan dengan sesama tetap rukun, damai dalam mencapai suatu kesejahteraan dalam masyarakat.³

Meskipun negara dan agama memiliki tujuan yang sama, tetapi kadang kala tujuan tersebut tidak dipahami dengan baik. Sering kali pemerintah dan gereja mengalami pertentangan dalam berbagi keputusan baik yang dilakukan gereja maupun oleh pemerintah. Sikap anti gereja dan pemerintah itu juga terjadi karena ketidak-adilan yang terjadi dalam masyarakat. Gereja dan pemerintah sering diadu domba oleh kalangan tertentu.⁴ Pada dasarnya masyarakat Seko hanya memahami politik sebatas kegiatan pemerintah saja

²Andreas a. Yewangoe, *Tidak Ada Negara Agama : Satu Nusa, Satu Bangsa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 179.

³Andreas Simon Pardomuan Nainggolan, *Jejak-Jejak Langkah Pewartaan Kabar Baik Di Indonesia* (Jawa Timur: Lakeisha, 2021), 187.

⁴ Ibid.

berkaitan dengan perebutan kekuasaan serta menata kehidupan sebuah kota atau lingkungan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Seko, salah satu pergumulan bersama yang dihadapi antara pemerintah dan gereja terkait dengan infrastruktur jalan poros Seko-Sabbang. Hal itu dikarenakan akses jalan yang ditempuh kurang lebih 2-3 hari untuk membawa hasil bumi ke Sabbang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menjadi persoalan ialah keluhan yang sudah bertahun-tahun sampai saat ini belum terpenuhi karena berbagai faktor, diantaranya permainan politik kotor oleh oknum tertentu yang hanya menjadikan jalan poros Seko-Sabbang sebagai ajang politik dengan janji-janji palsu. Persoalan pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya persoalan sosial-ekonomi tetapi dipandang sebagai persoalan teologis. Gereja dipanggil untuk mengambil bagian bersama-sama dalam pembangunan infrastruktur untuk menggapai hidup yang penuh harmoni. Gereja yang ikut bergumul dalam masalah pembangunan infrastruktur jalan adalah cerminan gereja yang peduli.

Melalui pengamatan penulis, gereja sebagai lembaga sosial juga punya peran sosial politik dalam kehidupan sosial. Namun kesadaran politis itulah yang penulis amati belum sepenuhnya nampak dari gereja di Seko saat ini. Pengamatan sementara penulis, melihat bahwa gereja mengalami

kemerosotan kesadaran peran sosio-politis. Peran sosial gereja artinya tindakan yang diharapkan dari gereja melalui kehadirannya dalam lingkungan masyarakat dalam mewujudkan perannya. Kemerosotan itu juga terlihat dengan sikap gereja yang selama ini berpatokan pada lembaga pemerintah saja dalam mengupayakan perbaikan infrastruktur, yang idealnya gereja juga memiliki inisiatif melalui tindakan nyata sebagai wujud peran politisnya. Peran politis gereja artinya peran serta keterlibatan yang dilakukan gereja dalam menata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana tujuan dari politik itu sendiri yaitu menata kehidupan.⁵Dengan adanya masalah tersebut penulis tertarik melakukan sebuah penelitian menganalisis sejauh mana peran yang telah dilakukan gereja selama ini dengan judul: “Analisis Sosio-Teologis Terhadap Peran Politis Gereja Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Seko”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan satu rumusan masalah yaitu: bagaimana Peran Sosio-Politis yang telah dilakukan gereja dalam pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Seko.

⁵Pengamatan awal penulis terhadap realitas yang terjadi di Seko.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini ialah:
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran politis yang telah gereja lakukan dalam pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Seko.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Tulisan ini dapat bermanfaat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap peran gereja dalam lingkup IAKN Toraja. Dalam mata kuliah Misiologi, Teologi Sosial dan Teologi Kontekstual .

b. Manfaat Praktis

Tulisan ini dapat bermanfaat secara praktis dalam pelayanan gereja dan peran gereja politis dalam pembangunan infrastruktur jalan dan pada saat yang sama menjadi gambaran penyelesaian masalah mengenai pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Seko.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Landasan Teori

Bagian ini berisi tentang landasan teori yang menguraikan kerangka berpikir tentang gereja dan pembangunan dan peran gereja terhadap pembangunan infrastruktur jalan sebagai perwujudan politik gereja.

Bab III. Metode Penelitian

Menyajikan gambaran umum lokasi penelitian serta realitas yang terjadi di dalamnya. Juga gambaran umum tentang gereja dan pembangunan serta peran gereja dalam pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Seko sebagai perwujudan politik gereja.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan.

Bagian ini akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian serta kajian Sosio-Teologis tentang realitas yang terjadi dan juga bagaimana peran gereja.

Bab V. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yakni hasil dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran berkaitan dengan masalah yang diteliti setelah mengetahui hasil dari penelitian.

